

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah atau *government* dalam bahasa Indonesia berarti organisasi atau sekelompok individu yang memiliki wewenang dan kekuasaan atas kegiatan orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah tertentu. Semua negara yang ada di dunia tentunya memiliki pemerintah yang mengatur dan menjalankan tatanan kenegaraan dari negaranya masing-masing demi tercapainya tujuan dan cita-cita dari negara tersebut. Indonesia juga memiliki pemerintah yang berdaulat dan telah diakui setelah pengesahan UUD 1945, dan melalui pengakuan kemerdekaan Indonesia secara *de jure*. Menurut Napitupulu (2012)

“pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan dalam mengatur kekuasaan suatu negara.”

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah harus berpedoman dan patuh pada konstitusi yang ada di negaranya. Konstitusi tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara Indonesia sendiri menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, yang menjadi dasar dari segala hukum untuk mengatur pemerintahan negara yang lebih baik.

Di era reformasi ini, terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa. Tidak hanya di pemerintah pusat, pemerintah daerah pun diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang baik. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah

“penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugasnya pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Penyelenggaraan pemerintah daerah tentunya tidak dapat lepas dari otonomi daerah, yang di dalamnya menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Menurut Nurcholis (2007)

“otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.”

Pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan pelaporan keuangan dengan tetap melaksanakan otonomi daerah dengan baik. Laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, dan informasi ini dapat digunakan sebagai gambaran hasil keuangan perusahaan. Melalui laporan keuangan kita dapat menerima informasi tentang keadaan posisi keuangan dan kita akan mengetahui hasil apa saja yang telah dicapai pemerintah selama periode ekonomi yang relevan. Selain negara menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah, kota atau kabupaten dan semua instansi dan lembaga layanan juga harus mampu menyusun pelaporan keuangan. (Adhitama, 2017).

Fenomena pelaporan keuangan dari masing-masing pemerintah daerah di Indonesia dapat diteliti secara lebih lanjut. Hal ini dikarenakan masih banyaknya laporan keuangan yang memiliki masalah pelaporan yang kemudian mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu sendiri. Menurut Said dan Noch (2018), Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah

“suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.”

Pemeriksaan mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah pemerintah provinsi yang ada di Indonesia telah dilaksanakan oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada masing-masing provinsi. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian informasi pada laporan keuangan pemerintah provinsi tersebut. Mengacu pada Undang - Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK selaku pemeriksa, dan opini-opini tersebut antara lain 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ; 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ; 3) Tidak Wajar (TW) ; 4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 34 provinsi yang ada di Indonesia, ditemukan bahwa 32 provinsi memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan 2 provinsi memperoleh predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian), kedua provinsi tersebut adalah provinsi Maluku Utara dan Papua. Penyebab diperolehnya predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) bisa ditimbulkan dari beberapa aspek seperti faktor

pengawasan, pengendalian internal, dan beberapa faktor eksternal lainnya. Kemudian, walaupun provinsi tersebut memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tetap ada beberapa koreksi terkait laporan keuangan yang disajikan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah laporan yang disusun dari gabungan seluruh laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di dalam pemerintahan provinsi terkait yang juga sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan posisi keuangan daerah yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam penilaian kinerja pemerintah maupun dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dijelaskan sebelumnya, diolah dan dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki 4 bidang utama yakni : Anggaran, Perbendaharaan, Pengelolaan BMD, dan Akuntansi yang bersama-sama berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, BPKAD juga berperan dalam merencanakan rumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mencakup mulai dari menyusun rancangan / perubahan APBD, membuat tatanan usaha APBD, menetapkan dan melaksanakan APBD, pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset daerah, membina dalam urusan administrasi pengelolaan keuangan provinsi dan membina pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kemudian, laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Contoh kasus mengenai kualitas laporan keuangan adalah Laporan

Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Berdasarkan pemeriksaan yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalimantan Timur menyatakan dan memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian” yang merupakan keberhasilan yang kesepuluh bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Akan tetapi, dibalik pencapaian tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan 43 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa permasalahan yang ditemukan adalah pelaksanaan atas 35 paket pekerjaan pada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melenceng dari ketentuan asalnya, yang mencapai kurang lebih 5 miliar, yang terdiri dari kekurangan volume pekerjaan, selisih harga satuan, dan denda keterlambatan. Kemudian, pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang belum sesuai dengan ketentuan, yaitu belanja pegawai yang berupa remunerasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Remunerasi BLUD, adanya kelemahan proses pengadaan pekerjaan konstruksi, dan penyelesaian piutang macet yang tidak efektif sehingga piutang senilai kurang lebih 21 miliar belum diproses penyelesaiannya melalui panitia urusan piutang negara atau melalui pejabat pengelolaan keuangan daerah. Lalu permasalahan terakhir yang disebutkan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki kebijakan atas properti investasi yang mengakibatkan nilai aset tanah dan bangunan yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan, belum dapat disajikan dalam neraca secara informatif untuk membantu dalam pengambilan Keputusan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). (<https://bitly.ws/3h5Cm>)

Munculnya beberapa masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini memiliki kaitan dengan beberapa variabel yang dipertimbangkan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah variabel pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan tersebut harus disusun sesuai dengan kaidah dan aturan standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan milik pemerintah daerah harus mengacu pada SAP keuangan yang telah ditetapkan. SAP sendiri merupakan persyaratan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia, di mana pemerintah mensyaratkan penyusunan standar tersebut kepada komite standar independen yang dibentuk melalui Keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. peraturan ini menjadi pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap daerah/kota administratif, daerah otonom, dan provinsi dalam menyampaikan laporan keuangan kumulatif kepada pemerintah daerahnya. (Mentu, 2016).

Variabel kedua Sistem Pengendalian Internal. Menurut Mulyadi (2013)

“adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Sistem Pengendalian Internal memainkan peran penting dalam mewujudkan kualitas pelaporan keuangan yang kredibel. Pemerintah Indonesia memiliki peraturan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 bahwa untuk

efisiensi, transparansi, efisiensi dan tanggung jawab, pemerintah harus memimpin SPIP. Jika sistem pengendalian intern lemah, kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan dan pelaksanaan anggaran sangat tinggi.

Variabel ketiga adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia. Menurut Wirawan (2009) Kompetensi Sumber Daya Manusia melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif. Kurangnya pegawai negeri yang berkualitas dan pelatihan akuntansi merupakan kelemahan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi daerah yang baik. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang terampil untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat. (Karmila, dkk., 2014).

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, sebagai variabel independen dengan variabel dependennya merupakan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di beberapa daerah yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Nilamsari, Sukesti, Alwiyah, Hanum, dan Wibowo (2020) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Simanjuntak (2020) menyatakan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Rahman dan Permatasari (2021) melalui penelitiannya, menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Penelitian yang dilakukan oleh Anggadini, Bramasto, dan Aulia (2021) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat, menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Lalu, penelitian oleh Ikyarti dan Aprila (2019) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma menemukan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.

Kemudian ada pula penelitian yang dilakukan oleh Philadhelphia, Suryaningsum, dan Sriyono (2020) pada OPD Kabupaten Klaten yang menyatakan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia bernilai positif namun tidak signifikan, variabel Sistem Pengendalian Internal yang bernilai negatif dan tidak signifikan, serta variabel Standar Akuntansi Pemerintahan yang bernilai positif dan juga signifikan. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Shohabatussa'adah, Nasrullah (2021) pada OPD Pekalongan dengan hasil variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia bernilai positif namun tidak signifikan, sedangkan untuk variabel Sistem Pengendalian Internal bernilai positif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan untuk menguji kembali penelitian terdahulu yang sebelumnya sudah dipaparkan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi terhadap hasil penelitian sebelumnya. Kemudian, dari hasil itu, peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian kembali dengan menggabungkan beberapa variabel independen yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menggabungkan variabel independen yang

diambil dari penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, subjek penelitian yang digunakan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Alasan memilih subjek tersebut karena masih terdapat beberapa kekurangan pada laporan keuangan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sekalipun sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tidak tepatnya pengawasan dan sasaran atas beberapa program kerja pemerintah menjadi salah satu sorotan, serta kurangnya optimalisasi pemerintah dalam pengelolaan kinerja dan pekerjaan OPD yang ada, juga mengakibatkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih mendapatkan koreksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koreksi yang diberikan pada kesalahan seperti ketidaksesuaian pelaksanaan atas beberapa paket pekerjaan pada 10 OPD, pengelolaan keuangan pada BLUD yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga belum dimilikinya kebijakan atas properti investasi yang berpengaruh pada pengambilan Keputusan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menghasilkan dan meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi laporan yang lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan di periode berikutnya. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, dan juga berdasarkan penelitian terdahulu, maka judul penelitian ini :

**“PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN**

## **KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur?

### **1.3. Batasan Masalah**

Batasan Masalah dalam penelitian ini telah ditetapkan oleh peneliti dengan sedemikian rupa, agar penelitian ini bisa lebih terarah dan berfokus pada satu titik. Selain itu, batasan masalah ini juga dimanfaatkan untuk menghindari penyimpangan dari masalah pokok agar lebih terarah, serta mempermudah peneliti dalam mencapai tujuan penelitiannya. Batasan masalah yang dibuat antara lain :

1. Badan Pemeriksa Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) merupakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah dan menjadi OPD yang berhak membuat serta merumuskan laporan keuangan

- pemerintah daerah yang bersumber dari gabungan laporan keuangan pada masing-masing OPD yang ada di daerah tersebut. (Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.18 Tahun 2020).
2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Indikatornya ialah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).
  3. Adapun indikator yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam menguji variabel independen yang akan diteliti, yaitu :
    - a. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
    - b. Sistem Pengendalian Internal yang diteliti dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
    - c. Kompetensi Sumber Daya Manusia mengacu pada indikator pengetahuan, keterampilan, dan sikap menurut Hutapea dan Thoha (2008)
  4. Lingkup dari penelitian ini sendiri hanya untuk Badan Pemeriksa Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) di Provinsi Kalimantan Timur dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Melihat latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali bagaimana pengaruh dan konsistensi

dari variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menjadi refleksi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperbaiki Laporan Keuangan Daerah agar menjadi lebih terarah dan lebih baik.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Studi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya dalam teori, praktik dan kebijakan, antara lain :

#### **1. Kontribusi Teori**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan memberikan wawasan baru, meningkatkan pemahaman, serta pengetahuan peneliti lain tentang bagaimana pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **2. Kontribusi Praktik**

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat digunakan untuk membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan laporan keuangan dengan mempertimbangkan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

#### **3. Kontribusi Kebijakan**

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat membuat

Kualitas Laporan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih baik dan tersusun secara sistematis, serta dapat digunakan secara optimal melalui berbagai kebijakan di masa depan.

#### **1.6. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini, peneliti membagi menjadi tiga bab, di mana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan penelitian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Adapun sistematikanya adalah :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bagian ini adalah fondasi dasar dari skripsi ini yang isinya antara lain : Latar belakang, Rumusan Permasalahan, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat dari Penelitian ini.

##### **BAB II. DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bagian ini mencakup teori dasar dan kerangka kerja yang digunakan para ilmuwan untuk mempelajari fenomena. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu, korelasi antara variabel independen dan pengaruhnya terhadap variabel dependen, serta pembentukan hipotesis penelitian.

##### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu: jenis penelitian, subjek dan topik penelitian, populasi penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, variabel operasional, kerangka pemodelan penelitian, jenis dan teknik penelitian pengumpulan data, analisis data meliputi beberapa pengujian seperti Uji alat, Uji normalitas, Uji asumsi

klasik, dan Statistik deskriptif. Selain itu terdapat juga Uji hipotesis serta Rencana pembahasan.

#### **BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi deskripsi objek penelitian dan juga analisis statistik deskriptif yang dilakukan pada semua variabel. Lalu, pengujian validitas dan reliabilitas diperlukan bagi penelitian yang menggunakan data primer. Bagian ini juga menjelaskan hasil pengujian yang dilakukan pada hipotesis-hipotesis yang telah dibuat dan menjelaskan apakah berpengaruh positif signifikan atau tidak berpengaruh, serta mendiskusikan hasil penelitian dan kaitannya dengan penelitian terdahulu.

#### **BAB V. PENUTUP**

Bagian ini terdiri atas kesimpulan dan saran yang merupakan cuplikan ringkas dari bagian analisis data. Semua hal yang ditulis pada bagian ini harus sudah ada dan dibahas pada bagian analisis data. Serta, memuat kritik dan saran yang membangun terhadap penelitian yang telah dilakukan.